

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, dan keterampilan menjadi kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya melalui pengajaran, atau pelatihan, atau penelitian. Pendidikan ini diperuntukkan untuk seluruh manusia guna mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia untuk dikembangkan lebih nyata lagi. Pentingnya pendidikan harus bisa dirasakan oleh setiap manusia, untuk itu perlunya mengenyam pendidikan, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Pendidikan sejatinya tidak harus berawal dari ketika siswa memasuki gerbang sekolah dasar atau pendidikan formal, melainkan dari pendidikan informal dan non-formal. Menurut Faisal (Suprianto, 2007) mengatakan bahwa pendidikan formal adalah pendidikan sistem persekolahan. Menurut Soelaiman Joesoef (2004) pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang dengan sadar dilakukan tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pengertian pendidikan informal tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dari pengertian jenis pendidikan diatas menegaskan bahwa pendidikan tidak berasal dari pendidikan formal saja, melainkan bisa dari pendidikan informal dan juga non formal.

Pendidikan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan anak-anak diasah dengan seperangkat pengetahuan untuk memiliki kesadaran dan kemauan yang positif dalam menemukan dan merumuskan tujuan untuk dirinya di masa-masa mendatang. Sumber daya manusia (SDM) yang minim perlunya pendidikan untuk membangun perkembangan masyarakat. Pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar sembilan tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan wajib belajar Sembilan tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Kasus tinggal kelas, terlambat masuk sekolah dasar, anak putus sekolah dan ketidakmampuan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan di dunia pendidikan (Kompas, 2009).

Dalam menyikapi hal-hal yang terjadi tersebut pemerintah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan dalam melindungi warga negaranya dalam memperoleh pendidikan ataupun banyak di berbagai daerah yang telah memprogramkan pendidikan bebas biaya tidak hanya sampai jenjang SMP/MTs/Sederajat bahkan memberikan pendidikan gratis hingga 12 tahun. tetapi hal tersebut belum mencukupi seluruhaspek hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pada kenyataan di lapangan masih banyak yang ditemukan anak yang putus sekolah bahkan sama sekali tidak dapat mengenyam pendidikan (Aprilina Pawestri DKK, 2017). Pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kemajuan suatu bangsa, sekarang dan pada masa

yang akan datang hal ini yang diungkapkan oleh Pramoedya Ananta Toer (Purwo Udiutomo, 2013). Dengan begitu maka pemerintah seharusnya menindaklanjuti kembali program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun atau program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas). Dengan adanya program ini diharapkan siswa yang berusiamulai dari 7-15 tahun dapat mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai ia dinyatakan lulus dengan membawa ijazah SD.

Di Indonesia Jika dilihat dari sekarang angka putus sekolah semakin meningkat, jumlah dari tahun ajaran 2017/2018 yang sebanyak 187.824 siswa, menurun di tahun 2019/2020 sebesar 157.166 siswa. Namun di khawatirkan meningkat lagi pada masa pandemic covid-19. Sesuai survey yang di gelar Dana Anak PBB telah menemukan bahwa terdapat 1 persen atau sekitar 938 anak putus sekolah karena pandemi di Indonesia “Di antara semua anak usia 7-18 tahun, terdapat 88 persen masih bersekolah, 11 persen putus sekolah sebelum pandemi, dan 1 persen anak putus sekolah sebagai dampak pandemi covid-19, Unicef, Hiroyuki (Media Indonesia, 2020).

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tingkat angka putus sekolah yang di bilang lumayan tinggi sesuai data susenas pendidikan yaitu 111,040 mulai dari anak usia sekolah pada jenjang SD/MI sampai jenjang SMA/SMK di tahun 2019 (vox NTT, 2019). Menurut Hironimus sugi (11 juli 2019), pemerintah tengah mendesaing program untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ini ke jenjang sekolah lagi.

Demikian dikatakan Provinsial Manajer Program INOVASI NTT, Hironimus Sugi dalam keterangan pers di Kupang, Kamis. Hironimus Sugi

mengatakan hal itu terkait akan dilaksanakannyakegiatan lokakarya pendidikan yang berlangsung di Kupang pada tanggal 11-13 November 2019. Kata dia, adalah program kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia. Program ini dilaksanakan di Pulau Sumba dengan tujuan meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa kelas awal. Terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusif. “Data ini yang menjadi fokus perhatian ke depan, yakni untuk dapat kembali ke sekolah formal atau dapat mengakses pendidikan luar sekolah lainnya. Fokus yang lainnya adalah mempertahankan 1,35 juta anak usia sekolah yang sekarang berada di sekolah formal baik di jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/SMK untuk tidak drop out dan tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Sugi (Benny jahang, 2019)

Di Kabupaten Malaka, Pemerintah kabupaten malaka terus fokus memprioritaskan pembangunan Kesehatan dan Pendidikan untuk percepatan kemakmuran rakyat. Kata Bapak Stef Bria Seran(29 april 2020)“Kalau mau supaya rakyat ini tidak boleh miskin maka pertama yang harus ditata itu Kesehatan dan kedua baru Pendidikan. Kalau dua hal ini sudah ditata maka tinggal tunggu waktu rakyat akan makmur. Bila dua hal ini masih bobrok jangan bermimpi ada kemakmuran,”Bapak Stef (29 april 2020) menjelaskan, bahwa persoalan Kesehatan dan Pendidikan menjadi sentral perhatian untuk dilakukan penataan dalam segala aspek. Ini agar menjadi fondasi yang kuat dalam membangun daerah ini.“Jangan bosan-bosan urus kesehatan dan pendidikan karena dua hal ini merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah daerah. Kalau

rakyatnya sehat dan pintar maka daerah itu akan maju, berkembang dan makmur,” (Gatra, 2020).

Jika Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda karena menurut Masyarakat pendidikan adalah bukan suatu solusi dalam meningkatkan taraf kehidupan keluarga sehingga kadang terjadi banyak anak yang putus sekolah demi mengambil peranan dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Kecenderungan pandangan diatas lahir dari kalangan masyarakat petani. Anak dalam keluarga petani cenderung membantu dan mengelolah lahan pertanian mereka, pada umumnya sosial ekonomi masyarakat petani memiliki sistem kerja yang sangat homogen terlebih pada rutinitas kerja yang tidak membutuhkan skill, umumnya petani bekerja di sawah dengan sistem menanam yang dilakukan pada umumnya dua kali dalam setahun, dari semua orang kadang mengajarkan anaknya sejak dini untuk membantu di sawah dengan harapan kerjanya ringan dan mendapatkan hasil pertanian yang melimpah.

Jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Malaka mulai dari 3 tahun terakhir dari tahun 2018, sebanyak 684 siswa yang putus sekolah yang diidentifikasi dari jenjang SD sebanyak 280, SMP sebanyak 109, SMA sebanyak 229 dan SMK sebanyak 66 sedangkan yang mengualang ditahun ini sebanyak 1396 yang diidentifikasi dari jenjang SD/SMA. Sedangkan pada 2019/2020 sebanyak 982 siswa yang diidentifikasi, jenjang SD sebanyak 204 siswa, jenjang SMP sebanyak 204, jenjang SMA sebanyak 376 siswa, dan SMK sebanyak 198 siswa (Kemdikbud, 2021).

Sesuai dengan observasi awal penelitian diDesa Kleseleon, data angka putus sekolah yang diambil dilihat dari ekonomi masyarakat yang tidak mampu yang membuatnya putus sekolah. Jumlah data angka anak putus sekolah di desa kleseleon dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Jumlah Data Angka Putus Sekolah**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Putus Sekolah			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	keterangan
1	SD	4	4	6	14
2	SMP	3	1	5	9
3	SMA	1	2	3	6
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>29</b>

*Sumber: data desa kleseleon*

Demikian dapat disimpulkan dari tabel-tabel jumlah angka putus sekolah di atas bahwa jumlah keseluruhan dari tahun 2018-2020 sebanyak 29 anak yang putus sekolah. Dengan tingkat pendidikannya masing-masing dari sekolah dasar (SD) lebih tinggi di bandingkan SMP dan SMA. Dari tabel diatas juga kita bisa melihat angka putus sekolah yang tertinggi di tahun 2020 yang berjumlah 14 anak/siswa yang putus sekolah. Selama masa pandemi ini ekonomi masyarakat yang kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketidak mampuan dalam membiayai anak sekolah. Hal ini yang membuat orang tua tidak mampu sehingga

memutuskan anaknya di dunia pendidikan untuk membantu pekerjaan orang tuanya baik dibidang pertanian atau perkebunan.

Sesuai dengan tabel angka putus sekolah diatas pemerintah Desa Kleseleon, dalam upaya megatasi angka putus sekolah, sesuai dengan program yang diterapkan yaitu memberikan bantuan kepada anak yang tidak mampu dalam bentuk fisik ataupun nonfisik untuk membiaya pendidikan dan juga kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Perlu juga Memberikan motivasi kepada para orang tua siswa akan pentingnya pendidikan, sehingga membuat orang tua siswa meyakinkan anak untuk tetap sekolah tanpa harus putus sekolah/berhenti bersekolah.

Dengan upaya yang ada perlunya tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah desa berperan untuk mengamati dan mengawasi masalah-masalah yang akan terjadi di masyarakat mengenai siswa yang putus sekolah. Dan bisa diketahui akar masalah yang terjadi terhadap siswa yang putus sekolah. Dalam program bantuan PKH yang diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat pendidikannya untuk mengatasi anak/siswa putus sekolah. Sehingga tidak terjadi penyalagunaan keuangan tersebut agar kebutuhan anak untuk sekolah tetap ada sesuai hak dan kewajiban untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 2.**

**Jumlah Data Kk Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)**

No	TAHUN	KETERANGAN
1	2020	18 KK
2	2021	19 KK
TOTAL		37 KK

Sumber: *Desa kleseleon*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) penunjang terhadap pendidikan di tahun 2020 sebanyak 18 KK yang menerimanya sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 19 KK. Jumlah keseluruhan dari tabel di atas sebanyak 37 Kk yang menerimanya, seuit dengan itu perlunya pengawasa dari pemerintah desa untuk mengarahkan masyarakat dalam menggunakan keuangan yang baik sehingga tidak salah sarannya. Dengan itu untuk menyadarkan masyarakat dengan pendidikan agar masyarakat bisa memahami tujuan dari pendidikan untuk anak-anak sekolah dan orang tua, Sehingga bisa mengatasi tingginya tingkat angka putus sekolah yang terjadi saat ini.

Untuk menghindari terjadinya hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari bentuk buku tulisan yang lain ataupun media maka penelitian yang diambil akan menerapkan karya ilmiah yang terjadi acuan yang dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Peneliti terdahulu dari Andi Baharun, A., & Ramlahwati yang berjudul Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekolah Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Membahas Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan Desa. Dari Undang-undang tersebut salah satu tugas pemerintah desa adalah pembinaan kemasyarakatan, membina kehidupan masyarakat desa yaitu tidak terbatas pada aspek fisik saja, akan tetapi perlu pula peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan pendidikan. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi maka *learning society* harus menjadi budaya dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang harus menjadi prioritas dalam pembinaan kehidupan masyarakat adalah sektor pendidikan. Ukuran keberhasilan pembinaan dan pembangunan disuatu wilayah adalah keberhasilan dibidang pendidikan, karena melalui pendidikan maka sumber daya manusia dapat ditingkatkan kualitasnya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa dan faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mengenai peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa, terkait perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pada dasarnya sudah cenderung efektif, karna demikian terjadi penurunan angka putus sekolah disebabkan adanya kepedulian pemerintah desa, orangtua dan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa yakni pengaruh sesama teman sepergaulan, dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi dan kondisi fisikserta sebagian besar disebabkan oleh faktor pengaruh Sesama teman sepergaulan/sepermainan anak tersebut. Perbedaannya yaitu pada penelitian Andi Baharun, A., & Ramlahwati lebih menfokuskan penekanan peran pemerintah terhadap angka putus sekolah.

Peneliti Ramlah yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desajulubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2019. Membahas tentang paran orang tua terhadap anak putus sekolah yang dimana Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena itu nasib dan masadepan anak-anak adalah tanggung jawab kita semua. Tetapi tanggung jawab utamaterletak pada orang tua masing-masing. Orang tualah yang berkewajiban memelihara,mendidik, dan membesarkan anak-anaknya agar menjadi manusia yangberkemampuan dan berguna. Setelah kepribadiannya terbentuk, peran orang tuaselanjutnya adalah mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anaknya.Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah merupakanpendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua terhadap anak putus sekolah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, untuk mengetahui apa saja dampak yang dihadapi anak yang putus sekolah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi orang tua terhadap anak yang putus sekolah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni sama-sama membahas tentang peran dalam mengatasi angka putus sekolah. Perbedaannya yaitu pada penelitian Ramlah menfokuskan peran orang tua terhadap anak yang putus sekolah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu 1. Bagi anak yang sudah putus sekolah orang tuasebagai pendidik. 2. Bagi anak yang putus sekolah peran orang tuanya sebagaimotivator untuk anaknya di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian saya ini memfokuskan pada peran kepala desa dalam mengatasi angka putus sekolah yang ekonominya kurang mampu.

Peneliti Lennanda Sandhopa yang berjudul Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan kabupaten Kepahiang tahun 2019. Membahas tentang faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua

yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan pergaulan sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

Hasil dari peneliti ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni sama-sama membahas penyebab angka putus sekolah. Perbedaannya yaitu Lennanda Sandhopa memfokuskan pada faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Initerlihat dari hasil penelitian bahwa dalam penelitian ini menghasilkan lima temuan(1) kurangnya minat belajar anak putus sekolah (2) latar belakang ekonomi orangtua anak putus sekolah rendah (3) latar belakang pendidikan orangtua anak putus sekolah rendah (4) Pergaulan lingkungan anak putus sekolah (5) usaha dan upayapemerintah desa dalam mensosialisasikan pendidikan kepada anak-anak dan orangtua masih kurang. Sedangkan penelitian saya memfokuskan pada peran yang dilakukan kepala desa dalam mengatasi angka putus sekolah terhadap ekonomi yang tidak mampu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI DESA KLESELEON, KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN MALAKA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mencegah angka putus sekolah di Desa Kleseleon?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Kleseleon?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulis dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala desa Kleseleon dalam mencegah angka putus sekolah di Desa Kleseleon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah di Desa Kleseleon.

### **1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal ini:

1. Manfaat Praktis
  1. Untuk menambah wawasan berpikir bagi penulis, dan pengalaman penulis sendiri dalam menyelesaikan penulisan tentang peran kepala desa dalam mengatasi angka putus sekolah di desa Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
  2. Untuk Memberikan informasi yang berarti bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang menyebabkan angka putus sekolah dan bagaimana peran pemerintah desa dalam menanganinya.
2. Manfaat Teoritis

1. Dapat masukan penting bagi Peran Pemerintah Desa untuk menangani tingkat angkat putus sekolah diDesa Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini sesuai masalah-masalah yang ada, terutama bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.